

DAFTAR PUSTAKA

- Bapeda Kabupaten Lampung Barat. *Rencana Strategik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003-2007*. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 2004.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. *Lampung Barat Dalam Angka 2006*. BPS Kabupaten Lampung Barat. 2007.
- Nordiawan, Deddi. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2006.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2008.
- R.D. Lee, Jr. and R.W. Johnson. *Public Budgeting Systems*. 6th edition. an Aspen Publication Gaithersburg. Maryland. 1998.
- Siregar, Doli D. *Manajemen Aset (Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah)*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004.
- Tunggal, Amin Widjaya. *COSO - Based Auditing*. Harvarindo. Jakarta . 2000.
- Yuwono, Sony, Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publishing. Malang Jawa Timur. 2005.
- Abdullah, Irvan Leonardo. *Analisis Inventarisasi Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman*. Tesis Magister Ekonomi Pembangunan. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2006.

Budisusilo, Suryantoro. *Penilaian dan Pengelolaan Aset Daerah dalam Pembngunan Daerah*. Makalah Seminar Nasional. Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2005.

Irawati, Novie HP. *Analisis Sistem Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Mendukung Manajemen Aset Daerah*. Karya Akhir Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Jakarta. 2005.

Wardhana, Iwan Henry. *Strategi Pengelolaan Aset Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dengan Penerapan Balanced Scorecard)*. Tesis Magister Sains Perkotaan. Universitas Indonesia. Jakarta. 2004.

INTERNET :

www.lampung.go.id.

www.lampungbarat.go.id.

LANDASAN HUKUM :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Keputusan Menteri Dalam Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

Keputusan Menteri Dalam Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota

Keputusan Menteri Dalam Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/185/KPTS/12/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2002.

Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 156 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan.

Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/29/KPTS/06/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2004.

Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/30/KPTS/06/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2004.

Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/143.a/KPTS/06/2004 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/12-SWK/KPTS/03/2006 tentang Pelaksanaan Secara Swakelola Sensus Barang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2006.

Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/15/KPTS/06/2006 tanggal 28 Pebruari 2006 tentang Tim Pelaksana Sensus Barang Daerah.

Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/141/KPTS/II.14/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Pemakai dan atau Pengguna Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.